

**PERATURAN DAERAH KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2002**

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka peraturan daerah Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu disesuaikan
- c. bahwa Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c di atas maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633)
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684)
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Perpajakan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran negara Nomor 4138)
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden)
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Darah
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK HOTEL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah Berserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah adan atau Perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel
8. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran
9. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri dan atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan commanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengna nama dan alamat dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya
12. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel
13. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak daerah
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran atau jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu (1) bulan takwin atau jangka waktu yang lain ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun buku yang tidak sama dengan Tahun takwim
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun pajak, atau dalam bagian Tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Perpajakan , penentuan besarnya pajak atau Perpajakan yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak atau Perpajakan kepada wajib pajak atau wajib Perpajakan serta pengawasan penyeterorannya
19. Surat Pemberitahuan Pajak daerah yang disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak

- dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar
 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang kemudian disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang kemudian disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan kelebihan jumlah pajak daerah lebih bayar yang dapat pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang
 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
 26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan pengihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
 27. Surat Pemberitahuan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah
 28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
 29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atau banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
 30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupan neraca dan laporan rugi laba pada setiap Tahun Pajak terakhir

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Nama Pajak ini adalah Pajak Hotel
- (2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain, gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hotel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost
- b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximili, telex, fotocopy, pelayanan cuci, strika, taksi dan penganggukutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugara (Fitness centre), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan dan dikelola oleh hotel
- d. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel
- e. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel yang diperuntukkan bagi karyawan
- b. Asrama dan pesantren
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayarannya
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan dan salon yang disediakan oleh umum di hotel
- e. Pelayanan perjakanaan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Wilayah pemungutan pajak yang terutang adalah wilayah Kota Kupang